



# DKI Dukung "E-audit" BPK

## Telat Serahkan LKPD Bisa Jadi Preseden Buruk

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung transparansi dalam penggunaan anggaran. DKI telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan PT Bank DKI. Dengan kesepakatan itu, kini BPK memiliki akses atas data transaksi rekening DKI secara *online* di PT Bank DKI.

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Wiriyatmoko, Senin (7/4), mengatakan, kesepakatan dengan BPK dan Bank DKI itu merupakan salah satu implementasi *e-audit* BPK kepada pemerintah daerah.

"Kesepakatan itu sudah ditandatangani pada 24 Desember 2013 lalu," kata Wiriyatmoko dalam sambutannya sebelum menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 ke BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Wiriyatmoko, LKPD diserahkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat 3 yang menyebutkan, LKPD disampaikan gubernur/bupati/wali kota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPD yang diserahkan kepada BPK tersebut telah ditinjau ulang oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI telah melakukan koreksi terhadap hasil *review* Inspektorat.

Laporan keuangan tersebut merupakan konsolidasi dari laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang selanjutnya disusun menjadi 48 entitas akuntansi penggabungan. Laporan ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca daerah per 31 Desember 2013, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

"Tahun 2013, DKI mengelola APBD sebesar Rp 50,26 triliun atau naik Rp 21,55 persen di-

bandingkan APBD tahun 2012. Realisasi pengeluaran APBD 2013 sebesar 82,33 persen. Sisa anggaran sekitar Rp 7 triliun," kata Wiriyatmoko yang didampingi Kepala Inspektorat DKI Franky Mangatas dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKD) Endang Wijayanti.

Wiriyatmoko berharap LKPD tahun 2013 dapat diapresiasi BPK dan bisa mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pada 2012, DKI juga mendapat opini WTP tetapi dengan paragraf penjelas (DPP).

Sebanyak lima penambahan paragraf penjelas sudah ditindaklanjuti. Pertama, kebijakan penyisihan piutang telah diterapkan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi Pemprov DKI Jakarta.

"Yang kedua, PT Pembangunan Jaya telah menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahun 2012 kepada Pemprov DKI. Sementara terkait PT Rumah Sakit Haji, DKI berencana menghibahkan seluruh saham milik Pemprov kepada Kementerian Agama untuk dijadikan *teaching hospital* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta," kata mantan Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.

Saat ini, DKI tengah mengajukan permohonan persetujuan hibah RS Haji kepada Ketua DPRD DKI Jakarta.

Poin ketiga dalam paragraf penjelas terkait sengketa lahan di Meruya Selatan dengan PT Portanigra. DKI dilaporkan sedang menunggu putusan Mahkamah

Agung terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemprov. Keempat, DKI mengupayakan bantuan hukum guna menyelesaikan masalah ganti rugi tanah dalam kasus sengketa dengan PT DWK.

Terakhir, poin kelima, DKI mengakui belum menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap karena pelaksanaan sensus aset masih dalam proses evaluasi.

### Terlambat

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Bambang Pamungkas menerima LKPD Pemprov DKI Jakarta. Bambang mengatakan, DKI telah tujuh hari terlambat dan menjadi satu-satunya yang terlambat menyampaikan LKPD dari 16 provinsi di wilayah Jawa-Sumatera.

"Semoga keterlambatan ini bukan karena menurunnya komitmen pimpinan dan staf Pemprov DKI Jakarta untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip *good governance*, khususnya prinsip akuntabilitas," kata Bambang.

Bambang mengingatkan, meskipun LKPD sebelumnya mendapat opini WTP DPP, tidak menjamin LKPD tahun 2013 berbuah opini yang sama. Melemahnya sistem pengendalian intern, dan meningkatnya pelanggaran kepatuhan yang bersifat material apalagi jika berdampak pada nilai aset yang disajikan jelas sangat berpengaruh terhadap opini.

Dengan kata lain, berkurangnya komitmen atas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dapat membuat opini atas LKPD menjadi wajar dengan pengecualian (WDP), *disclaimer*, bahkan *adverse* (tidak wajar). LKPD Bank Indonesia, kata Bambang, adalah salah satu LKPD yang pernah mendapat opini *disclaimer*.

BPK dalam melakukan audit tidak akan terpengaruh gejolak politik yang kini mencapai suhu tertinggi menjelang pemilihan legislatif dan presiden. (NEL)



**BPK RI**  
**Perwakilan**  
**Provinsi Riau**

Nama Media  
Hari/ Tanggal  
Halaman/ Kolom  
Wilayah/ Kode  
Tema

:Kompas  
:Selasa/8 April 2014  
:27/1-3  
:Jakarta/ Berita BPK  
:DKI Dukung "E-audit" BPK

---